

Adaptive Governance Pemerintahan Nurdin Abdullah dalam Peningkatan Investasi Asing di Sulawesi Selatan

Muhammad Fathurahman Pratama, Sangkala, Suryadi Lambali

Universitas Hasanuddin

e-mail: fathurahmanpratama00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintahan Nurdin Abdullah dalam menarik investor asing dan hambatan serta tantangannya di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dijelaskan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal atau investasi asing di Sulawesi Selatan selama tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dengan beberapa strategi-strategi yang disusun yakni ramah terhadap investor melalui proses pengembangan potensi daerah dalam beberapa event, mempermudah perizinan dengan merilis Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2020 dan pengimplementasiannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 serta pengembangan kawasan industri di beberapa daerah. Hambatan utama yang dihadapi yaitu minimnya integrasi dengan pelabuhan di beberapa kawasan industri, komitmen pimpinan yang kurang, namun dukungan serta kerja sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih berjalan. Implikasi dalam penelitian ini adalah sikap ramah terhadap para investor asing dapat membuka lapangan kerja yang luas dan juga penanaman modal yang harus diperhatikan dengan baik guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan daerah dapat meningkat.

Kata Kunci :

Strategi Kerja Sama, Penanaman Modal Asing

PENDAHULUAN

Berbagai potensi yang dimiliki pada tiap daerah haruslah dikelola dengan baik sebagai upaya perbaikan kehidupan masyarakat di daerah. Daerah harus lebih diperhatikan kebutuhannya karena daerah yang akan menunjang negara untuk dapat tetap eksis sehingga mereka tidak terisolir

dari dunia luar (Permatasari, 2014). Kesenjangan yang terjadi di daerah seperti Sulawesi Selatan akibat tidak meratanya pembangunan infrastruktur di daerah pelosok, kualitas sumber daya manusia yang tidak mahir dalam pengelolaan teknologi sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan melambat. Otonomi dipandang sebagai penyelesaian alternatif atas kesenjangan

yang terjadi di daerah. Daerah memiliki hak otonom memberikan peluang bagi mereka untuk membuka peluang investasi asing dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan di wilayahnya.

Di Indonesia sempat muncul gagasan federalisme sebagai bentuk perlawanan atas kesenjangan pemerintahan yang terjadi. Perlakuan yang tidak merata oleh pemerintah pusat terhadap daerah selama ini, menimbulkan sikap pro (dukungan) dan kontra (tidak mendukung) di masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa negara kesatuan sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan karena Indonesia yang memiliki penduduk sesuai data tahun 1999 kurang lebih 210 juta jiwa sudah tidak memadai lagi apabila diwadahi dalam negara kesatuan, sehingga federal dipandang sebagai jalan tengah dari sejumlah tuntutan daerah untuk memisahkan diri yang akhir-akhir ini menguat. Sebagian masyarakat pula menolak gagasan federalisme karena menganggap bahwa penerapan federalisme akan memecah belah masyarakat Indonesia dan negara kesatuan masih sangat relevan dengan menerapkan UU 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah secara konsisten (Huda, 2017).

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan perihal distribusi kekuasaan dalam otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pertama ialah penyerahan tiap-tiap urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan yang

terdapat di wilayah otonomi atau bisa dikatakan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah, seperti gubernur sebagai wakil pemerintah tertinggi di suatu wilayah dengan tetap melaporkan hasil kinerjanya kepada pemerintah pusat. Pemberian kewenangan ini hanya beberapa bagian, seperti mengelola jalannya pemerintahan daerahnya, dan sebagainya. Kedua konsep desentralisasi ialah penyerahan atau pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerahnya. Ketiga ialah tugas pembantuan dimana penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota atau desa, pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada wilayah desa dalam pelaksanaan tugas tertentu, hal ini dilakukan sebagai adanya ketidakmerataan pembangunan yang terjadi dari suatu wilayah tersebut padahal potensi dari wilayah atau daerah tersebut sangat strategis, misalnya banyaknya destinasi wisata di wilayahnya tetapi dalam pengelolaannya sangat nihil.

Lebih rincinya mengenai pemerintahan daerah telah dijabarkan melalui UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut ialah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya pada sektor keamanan negara. Urusan pemerintahan

konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota seperti pada bidang urusan sosial, kemudian urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pentingnya pemerintahan yang adaptif agar masyarakat mendapatkan program atau layanan sesuai yang mereka butuhkan atas masalah yang sedang dihadapi saat ini. *Adaptive governance* memiliki peran sebagai *street level* birokrasi, regulasi, serta manajemen yang diharapkan dapat merangkum secara keseluruhan pola pemerintah dalam memberikan definisi mengenai peran mereka dan memfasilitasi visi pemerintah dalam kebijakan sumber daya organisasi dan alam. Ronald D. Brunner, dkk. (2005) menyebut bahwa *adaptive governance* mengacu pada prinsip dan praktek yang mendorong ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks dan dinamis yang mengacu pada *collaboration, learning, flexibility*, hingga *resilience*.

Indonesia sebagai negara yang berkembang, tentunya akan selalu mengupayakan dan berkepentingan untuk menarik investor asing sebagai upaya pertumbuhan perekonomian, baik skala domestik hingga nasional. Banyak hal yang dapat mendorong keberlangsungan peningkatan perekonomian, seperti pembukaan lowongan kerja yang luas, peningkatan kemampuan

teknologi, hingga upaya penarikan investor asing sebagai langkah membuka taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam menarik investasi asing, daerah haruslah diberikan wewenang untuk bagaimana mengelola sumber daya alamnya sendiri, karena merekalah yang tau karakteristik suatu wilayahnya sendiri. Otonomi dirasa perlu untuk diberikan agar pemerintah daerah dapat melakukan suatu kerjasama dengan pihak lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki segala potensi sumber daya alam dan secara geografis wilayahnya strategis hingga dijuluki sebagai pintu ekonomi dari kawasan timur Indonesia karena Sulawesi Selatan terus berbenah guna membangun daerah tersebut sebagai daerah yang produktif secara ekonomi, sosial maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung berbagai kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung yang baik seperti banyaknya pembangunan jalan yang menghubungkan antar kabupaten serta tersedianya potensi peluang yang siap dikembangkan. Namun kesemuanya itu ketika tidak dibarengi dengan modal maka kesuksesan untuk membawa pertumbuhan ekonomi tidak akan didapatkan dengan baik.

Adaptive governance mengedepankan prinsip kepentingan masyarakat sebagai hal utama dengan memberikan respon yang cepat terhadap tantangan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat agar pemangku kepentingan bekerja atas kebutuh-

an masyarakat guna mendapat hasil yang puas dan sesuai.

Kerjasama adalah bagian dari proses penjalinan hubungan yang lebih mendalam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disebut sebagai aktor diplomasi yang aktif dalam melaksanakan kerjasama luar negeri. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ragam potensi, baik dari segi pertanian, perikanan serta pariwisata yang mumpuni. Gubernur Nurdin Abdullah usai pelantikan kepala daerah, mengatakan Sulawesi Selatan dikaruniai oleh Tuhan berupa alam yang sangat indah dan tentunya ini adalah potensi yang harus dikembangkan demi menumbuhkan perekonomian.

Banyaknya potensi di Sulawesi Selatan belum berkembang, salah satu sektor yang dapat menjadi peluang di dalam menumbuhkan perekonomian yakni pertanian. Nurdin Abdullah mengungkapkan bahwa berbagai potensi di Sulsel belum dioptimalkan dengan baik, salah satunya adanya wilayah yang telah ditanami talas satoimo di Enrekang namun tidak adanya pihak asing yang mau melakukan investasi terhadap produk talas di Sulsel padahal dapat dijadikan daya jual di Jepang karena talas satoimo merupakan salah satu makanan pokok disana. Sehingga potensi-potensi tersebut haruslah dikelola dengan baik oleh pemerintah di dalam menumbuhkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, tentunya pemerintah menghadapi sebuah tantangan yang cukup mempengaruhi dal-

am mengurus urusan suatu daerah yang diakibatkan oleh keterbatasan sebuah anggaran dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki maupun pertumbuhan pembangunan daerah tentunya akan berakibat kepada rendahnya kualitas pelayanan masyarakat. Kegiatan investasi yang dilakukan dalam bentuk penanaman modal baik skala investasi dalam negeri hingga luar negeri, memiliki harapan dapat mengatasi perekonomian di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah menyadari serta melihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh daerah guna pengembangan daerahnya sendiri haruslah dilakukan. Banyaknya investor yang gagal menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan sebagai upaya menekan melambatnya pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan regulasi berupa peraturan daerah untuk memberikan izin kemudahan bagi investor (Ristryaningrum, 2019).

Pemerintahan yang adaptif akan membantu meningkatkan investasi asing, sebab pemerintah Sulawesi Selatan haruslah betul-betul memperhatikan kebutuhan daerahnya serta mengatasi kendala-kendala para investor untuk menanamkan modal di Sulawesi Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Nurathirah Aprillah Norman, Andi Rosdianti Razak, Rulin yang berjudul *Adaptive Governance*

dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju. Dalam tulisan tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam menjelaskan tata kelola pemerintah adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Mamuju. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *adaptive governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan PKL sudah berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan perkembangan PKL tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai lapak jual mereka. Faktor yang mempengaruhinya ialah adanya ketersediaan lapak jual yang baru sesuai dengan spesifikasi pedagang inginkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tujuan akhirnya memiliki kesamaan yakni kepuasan kepada publik atas layanan inovasi yang diberikan oleh pemerintah namun memiliki perbedaan yakni tidak adanya keterlibatan pihak swasta di dalamnya sehingga indikator *adaptive governance* belum secara maksimal terlaksana dengan baik (Norman, Razak, & Kasmad, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muh. Firyal Akbar, Alwi, Nur Indrayati, Muhammad Tang Abdullah yang berjudul *Adaptive Governance in Terms of The Limboto Lake Management Network*. Dalam tulisan tersebut menggunakan penelitian kualitatif deduktif dalam menjelaskan *adaptive governance* pengelolaan danau Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola adaptif dalam pengelolaan danau Limboto di Kabupaten Gorontalo belum maksimal hal tersebut

karena masih belum terlaksananya dengan baik koordinasi dan sinergi terkait program pengelolaan danau terutama pada sektor sipil dan *networking* yang tidak jelas, perlunya suatu badan yang terintegrasi dan juga terpadu secara langsung dengan pihak yang tertuju. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan indikator dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni *collaboration* namun dalam implementasinya belum maksimal, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan komprehensif menjelaskan keberhasilan kolaborasi antar sektor yang dilakukan (Alwi, Indar, & Abdullah, 2021).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menganalisis kemampuan kepemimpinan kepala daerah di dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna melahirkan suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini peningkatan investasi asing di Sulawesi Selatan sebagai salah satu faktor sumber peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah.

Adaptive governance yang optimal apabila pemerintah telah melaksanakan suatu strategi yang sesuai kebutuhan wilayah atau masyarakatnya, sehingga dalam penelitian ini akan membahas pemerintah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah guna peningkatan investasi asing harus memperhatikan kebutuhan aktor yang akan menjalin hubungan dengan pemerintah Sulawesi Selatan agar mereka nyaman dan mau menanamkan modalnya.

TINJAUAN TEORETIS

Penerapan *adaptive governance* menjadi sesuatu yang baik bagi menghadapi situasi lingkungan yang berubah secara cepat. Pemerintah daerah di Indonesia harus memiliki komitmen untuk dapat beradaptasi dengan situasi lingkungan yang dihadapi dengan mengutamakan prinsip pelayanan publik yang prima, demi terwujudnya kepuasan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pendekatan *adaptive governance* mendalami tiga hal aspek, yakni konsep tata kelola pemerintahan, manajemen, hingga adaptasi. Pengaturan suatu lembaga yang terbentuk sebagai upaya dari tata kelola pemerintah yang keputusan dan perilakunya berdasar hal baik, sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Begitu pun manajemen yang menekankan pada proses pengambilan keputusan serta pemerataan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar memberikan pengaruh positif atau baik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan hingga penerapan teknologi. Pemahaman terakhir ialah adaptasi menekankan pada kelangsungan hidup makhluk dalam bertahan dari kondisi lingkungan yang berubah. *Adaptive governance* pada akhirnya merupakan penggambaran dari suatu aturan yang terpacu kepada kepuasan manusia atau kebutuhannya yang berdasar pada perubahan pemahaman, tujuan, sosial, ekonomi hingga lingkungan (Hatfield-Dodds, Nelson, & Cook, 2007).

Pada akhirnya menurut Ronald D. Brunner, dkk. (2005) *adaptive governance* adalah model tata kelola pemerintahan yang mengutamakan suatu kepentingan publik dengan merespon cepat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Kehadiran konsep *adaptive governance* dari ketidaksesuaian antara karakteristik lingkungan dan cara organisasi dalam melaksanakan perannya.

Pada dasarnya tata kelola pemerintah adaptif hadir sebagai bentuk *continuous* atau pengembangan dalam memahami suatu ilmu pemerintahan dan juga manajemen publik modern. Dalam pendekatan adaptif akan membantu suatu organisasi menyelesaikan masalah layanan publiknya di tengah situasi lingkungan yang berubah secara instan.

Dalam implementasi tata kelola pemerintah adaptif, kepemimpinan di dalamnya perlunya melakukan pertimbangan dalam mengelola keberlangsungan pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian di dalam memimpin suatu institusi. Ketidakpastian terhadap perubahan yang tidak terduga menciptakan suatu tuntutan yang baru terhadap struktur tata kelola, terutama pada akomodasi terhadap pengetahuan baru dalam mengambil tindakan guna merespon persoalan yang sedang dihadapi.

Implementasi *adaptive governance* tidak terjadi dengan sendirinya melainkan perlunya komitmen dari seorang pemimpin atau atasan guna terselenggaranya kesejahteraan masyarakat secara luas. Tata kelola pemerintahan adaptif memiliki sebuah

pemikiran yang luas, terbuka dan visioner ke depan secara baik dari kepemimpinan lainnya agar mendapat apresiasi yang kemudian akan dijadikan pedoman oleh semua pihak, khususnya bawahannya dalam penyelenggaraan organisasi atau institusi. Hal tersebut dapat terlaksana jikalau pemimpin memiliki sikap yang ambis dalam mendukung keberlangsungan organisasi atau institusi dalam memberikan kesejahteraan terhadap lingkungan masyarakatnya.

Adaptive governance atau tata kelola pemerintah adaptif yang disebutkan Ronald D. Brunner, dkk. (2005) memperkenalkan beberapa faktor dalam membantu menentukan *adaptive governance* suatu organisasi, diantaranya yakni *collaboration*, *learning*, *flexibility*, dan *resilience*. Kolaborasi dalam *adaptive governance* mengacu pada kemitraan atau kerja sama antara berbagai pihak, termasuk di dalamnya ialah masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah dan organisasi non pemerintah. Kolaborasi memiliki tujuan sebagai *sharing* pengetahuan, keahlian dalam menghadapi perubahan lingkungan, sumber daya hingga mengatasi masalah yang kompleks (Brunner, et al., 2005).

Pentingnya pembelajaran akan mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan kapasitas secara adaptif. Pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya *adaptive governance* sebagai bahan refleksi atau evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil, yang tentunya memungkinkan pemerintah untuk dapat belajar dari pengalaman dalam melakukan perub-

ahan yang diperlukan sebagai perwujudan tingkat efektivitas kebijakan atas tindakan yang mereka lakukan.

Proses pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus yang dimana para pemangku kepentingan harus tetap belajar dari pengalaman yang telah dilaluinya dalam menyesuaikan strategi pengelolaan yang akan mereka lakukan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada (Webster, 2009).

Prinsip fleksibilitas dalam *adaptive governance* menekankan pada pentingnya menghadapi perubahan lingkungan dan mengatasi permasalahan yang kompleks. Fleksibilitas yang dimaksudkan ialah respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan dan permasalahan yang hadir di permukaan dengan adanya tata kelola yang tepat. Fleksibilitas pula terjalin apabila keputusan atau kebijakan yang dibuat sesuai dengan perubahan lingkungan dan masalah yang sedang dihadapinya. Dengan fleksibilitas dalam *adaptive governance* akan memungkinkan lahirnya inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap situasi lingkungan yang sering berubah (Brunner, et al., 2005).

Dalam *resilience* guna terwujudnya *adaptive governance* atau tata kelola pemerintah adaptif dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau sistem dalam beradaptasi, bertahan hingga pulih atas gangguan atau perubahan lingkungan yang tidak terduga. Dalam indikator ini Ronald D. Brunner, dkk. (2005) menekankan pada aspek bahwa organisasi publik harus mem-

iliki kemampuan untuk dapat mengatasi masalah dan pulih terhadap gangguan atau perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan fenomena investasi asing di Sulawesi Selatan. Adapun sumber primer yang digunakan ialah hasil wawancara serta adanya sumber sekunder melalui kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan tambahan pengumpulan data. Peneliti melakukan analisis deskriptif guna memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menarik investor masuk ke daerahnya dengan melihat kebutuhan masyarakat dan swasta melalui kamata *adaptive governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakannya

1. *Collaboration*

Jika ditinjau dari peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan salah satu indikator *adaptive governance* yakni adanya kolaborasi, dimana Gubernur Nurdin Abdullah telah banyak melakukan kerja sama luar negeri, misalnya dengan Ehime Jepang mereka telah melakukan *memorandum of understanding* (MoU) sebagai bentuk keseriusan melakukan pembangunan daerah kedua belah pihak karena memiliki kemiripan wilayah disebabkan adanya pengakuan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam prinsip-prinsip kesetaraan, serta adanya

niat membangun pernyataan kehendak mengenai penguatan SDA, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan, pendidikan, budaya dan juga olahraga (Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).

2. *Learning*

Pembelajaran bagian dari *adaptive governance* dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Nurdin Abdullah menyelesaikan studi S2 dan S3nya di Jepang sehingga mengambil konsep pentingnya menghadirkan kawasan industri agar produk yang dihasilkan dan yang diekspor tidak jauh lagi transit sehingga para investor betah menanamkan modalnya (Arif, 2022). Sektor industri menjadi penggerak perekonomian di suatu wilayah. Tidak bisa dipungkiri keberadaan industri akan membawa pertumbuhan ekonomi tanpa henti dikarenakan industri salah satu motor penggerak lahirnya lapangan kerja yang luas. Sulawesi Selatan sampai sekarang ini telah memiliki beberapa kawasan industri dan sementara dilakukan pengembangan industri berikutnya. Adapun kawasan industri yang telah ada di Sulawesi Selatan ialah Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dan Kawasan Industri Makassar (KIMA) serta pengembangan kawasan industri Takalar dan Maros. Guna membuka lowongan kerja yang baru, dibutuhkan investasi yang masuk. Nurdin Abdullah telah berhasil menghadirkan KIBA sebagai perwujudan pertumbuhan ekonomi di Bantaeng, apa yang dilakukannya berhasil menghantarkan Bantaeng yang dulunya daerah tertinggal menjadi daerah yang dilirik atau dikatakan maju. Keberadaan kawasan industri

akan memudahkan ekspor barang lebih mudah dan menjadi satu kesatuan tanpa harus melalui lagi transit di kota lain, seperti KIBA merupakan sebuah kawasan yang strategis dimana kawasan industrinya berbatasan langsung dan berhadapan dengan laut yang memudahkan secara langsung kegiatan ekspor yang ditunjang dengan proses *direct all* dengan keberadaan Makassar New Port sebagai sarana integrasi dengan kawasan industri tanpa melalui lagi Surabaya.

3. *Flexibility*

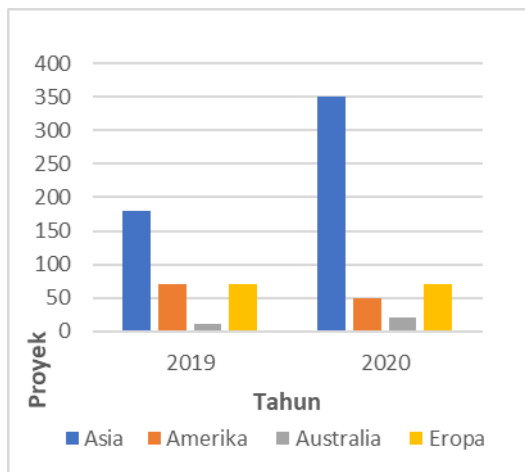
Kepala Dinas DMPTSP Sulawesi Selatan, AM. Yamin (2019) mengatakan bahwa pemerintah Sulawesi Selatan terus berupaya untuk melakukan sebuah strategi maupun perbaikan untuk mendorong hadirnya iklim investasi. Di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, Sulawesi Selatan makin ramah terhadap investasi, hal ini menjadi sebuah komitmen untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha dan industri, perizinan yang disederhanakan dan tentunya memberikan sinyal bahwasanya industri jauh akan lebih mudah masuk di Sulawesi Selatan. Komitmen ini bukan hanya sekedar janji, Gubernur Nurdin Abdullah merealisasikannya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 35/2020 tentang Forum Percepatan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan dimana dilakukan pembentukan forum percepatan investasi sebagai upaya memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan eko-

nomi melalui investasi maupun pariwisata. Setelah adanya komitmen Nurdin Abdullah mengenai keseriusannya dalam mempermudah izin masuk, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah 3/2021 tentang Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan Investasi berupa penyediaan data dan informasi peluang investasi, fasilitas lahan atau lokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan teknis, penyerhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui layanan terpadu satu pintu, kemudahan akses hasil produksi dan sebagainya. Hal ini lah diharapkan dapat mendorong para investor untuk melakukan penanaman modal di Sulawesi Selatan. Sehingga fleksibilitas pemerintah provinsi Sulsel yakni memberikan kemudahan investasi melalui pembuatan regulasi yang memungkinkan para investor dalam mengajukan izin investasi tidak lagi bertele-tele (Yolanda, 2019).

4. *Resilience*

Terakhir ialah *resilience* dalam *adaptive governance* ialah ketahanan terhadap kondisi lingkungan, dimana pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui strategi-strategi yang telah diuraikan sebelumnya telah berhasil menumbuhkan perkembangan investasi di Sulawesi Selatan meski di tengah pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1. Perkembangan Penanaman Modal Asing Tahun 2019-2020



Sumber : DPMPSTP Sulsel 2022

Data di atas menunjukkan dari rentang waktu 2019-2020, dimana tahun 2019 negara-negara Asia yang menanamkan modalnya 180 proyek naik di tahun 2020 menjadi 350 proyek, Amerika di tahun 2019 dari 70 proyek mengalami kemunduran menjadi 50 proyek di tahun 2020, kemudian Australia di tahun 2019 dari 20 proyek menjadi 30 proyek di tahun 2020, dan Eropa di tahun 2019 dan 2020 tetap di angka 60 proyek. Pertumbuhan investasi asing di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan di negara Asia dan Australia. Tentunya hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah Sulawesi Selatan dan keseriusannya untuk mengundang investor asing masuk. Adapun investasi asing terbesar yang masuk ke Sulawesi Selatan ialah Jepang dengan berbagai bidang, mulai dari perikanan, pertanian hingga otomotif. Seperti *Sumitomo Group* yang condong banyak melakukan pengelolaan hasil pertanian Sulawesi Selatan dan juga *Toyota Motor Corporation* yang senantiasa mem-

bantu sarana dan prasarana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi ramah terhadap investor yang dicanangkan oleh Nurdin Abdullah dan latar belakang pendidikannya yang berasal dari Jepang membawa dampak positif berhasil membawa investor untuk menanamkan modalnya. Sesuai dengan cita-cita Nurdin Abdullah yang menginginkan banyaknya lapangan kerja yang terbuka, maka diperlukan investasi yang masuk. Hal ini memberikan pula gambaran bahwa di tengah pandemi Covid-19 pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan peningkatan investasi asing meski kondisi lingkungan yang tidak pasti kala itu.

Hambatan dan Tantangan dalam Menarik Investor

Faktor yang menjadi penghambat serta menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ialah masih minim integrasi kawasan industri dengan pelabuhan, sebab dengan minim integrasi akan menambah harga produk yang dipasarkan yang dikarenakan jauhnya tempat pengiriman produk (Arif, 2022).

Disamping itu pasca penangkapan Nurdin Abdullah yang dilakukan oleh KPK memberikan banyaknya program-program di Sulawesi Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksana Tugas Gubernur yakni wakilnya sendiri Andi Sudirman Sulaiman harusnya melanjutkan program tersebut. Salah satu program yang tidak berjalan ialah *rest area michi no eki*, beberapa kawasan industri yang belum terbangun seperti di Takalar, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Nurdin Abdullah cukup efektif dalam menarik investor masuk ke Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat pertumbuhan penanaman modal asing yang masuk dari rentang waktu 2019-2020 mengalami pertumbuhan. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dalam menarik investor asing yakni menjalin kolaborasi atau kerja sama seperti pihak Jepang melalui beberapa perusahaan, mengadopsi konsep kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, serta adanya kemudahan investasi melalui adanya regulasi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M. F., Indar, N. I., & Abdullah, M. T. (2021). Adaptive Governance In Terms Of The Limboto Lake Management Network. *Nat.Volatiles&Essent.Oils*, 8(5), 11368-11388.
- Brunner, R. D., Steelman, T. A., Coe-Juell, L., Cromley, C. M., Edwards, C. M., & Tucker, D. W. (2005). *Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making*. New York: Columbia University Press.
- Hatfield-Dodds, S., Nelson, R., & Cook, D. (2007). Adaptive Governance: An Introduction, and Implications for Public Policy. *the 51st Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society* (pp. 1-13). Queenstown NZ: AgEcon Search.
- Huda, N. (2017). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). Adaptive Governance dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 145-161.
- Permatasari, A. (2014). Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 225-240.
- Webster, D. G. (2009). *Adaptive Governance: The Dynamics of Atlantic Fisheries Management*. US: MIT Press.

Website

- Ristyaningrum, A. (2019, Januari 16). *sulawesi.bisnis.com*. Retrieved from Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur di Sulsel: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>

Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2019, Januari 15). *sulselprov.go.id*. Retrieved from Pemprov Sulsel dan Provinsi Ehime Jepang Teken Kerjasama Penguatan Berbagai Bidang: <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-dan-provinsi-ehime-jepang-teken-kerjasama-penguatan-berbagai-bidang>

Yolanda, F. (2019, November 11). *republika.co.id*. Retrieved from Ini Faktor Penghambat Investasi Asing di Indonesia: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q0sl6u370/ini-faktor-penghambat-investasi-asing-di-indonesia>

Wawancara

Arif, S. K. (2022, Januari 30). Strategi Gubernur Nurdin Abdullah dalam menarik investor. (M. F. Pratama, Pewawancara)